



**P E M E R I N T A H   K O T A   T A N G E R A N G**  
**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**  
**DAERAH (RLPPD) KOTA TANGERANG**  
**TAHUN 2020**

---

Penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 69 ayat (1), dan merupakan amanat dari pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 merupakan perwujudan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kota Tangerang selama tahun anggaran 2020. dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Melalui Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 yang disampaikan secara transparan dan akuntabel diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2020, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan atau saran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan datang.

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa muatan RLPPD adalah sebagai berikut :

## 1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang, pemerintah pusat, swasta dan pihak –pihak lain dalam pembangunan nasional. Sebagai gambaran perkembangan indikator kinerja makro tahun 2019-2020 sebagai berikut :

**Tabel 1. Perkembangan Indikator Kinerja Makro Kota Tangerang Tahun 2019-2020**

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020	Perubahan
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia	78,43 poin	78,25 poin	-0,18
2.	Angka Kemiskinan	4,43 persen	5,22 persen	0,79
3.	Angka Pengangguran	7,13 persen	8,63 persen	1,5
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,05 persen	-6,92 persen	-10,97
5.	Pendapatan Per Kapita	77.162.796	63.262.774	-13.900.022
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,328 poin	0,339 poin	0,019

*Sumber : BPS Kota Tangerang, 2021*

### a. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat merupakan program utama yang menjadi bagian dari pelaksanaan misi pembangunan daerah Kota Tangerang. Melalui pembangunan bidang ini, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai meningkatnya kualitas

sumber daya manusia, terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, terpenuhinya kebutuhan pokok minimal dan kebutuhan dasar lainnya secara layak, serta meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat harus dapat diwujudkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2. Komponen IPM Kota Tangerang Tahun 2018 - 2020**

<b>Komponen IPM Kota Tangerang</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,45	71,57	71,60
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,83	13,84	13,85
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,51	10,65	10,69
Pengeluaran (Ribuan Rupiah)	14.443	14.860	14.484
Indeks Harapan Hidup	79,15	79,34	79,38
Indeks Pengetahuan	73,45	73,94	74,11
Indeks Pengeluaran	81,37	82,24	81,46
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>77,92</b>	<b>78,43</b>	<b>78,25</b>

Sumber: BPS Kota Tangerang (data diolah)

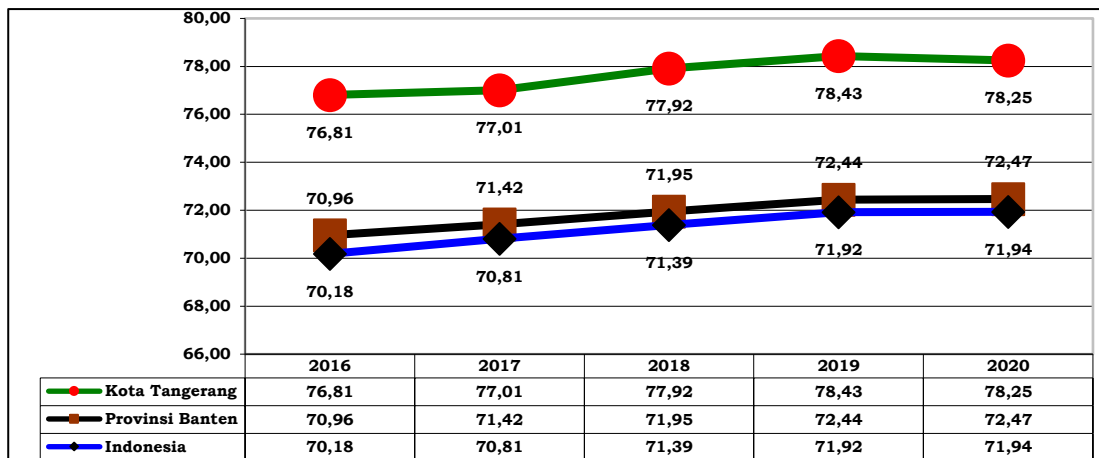
Sementara angka IPM Kota Tangerang dibandingkan dengan angka IPM nasional dan Provinsi Banten dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 3. IPM Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Nilai IPM</b>		
	<b>Kota Tangerang</b>	<b>Provinsi Banten</b>	<b>Nasional</b>
2016	76,81	70,96	70,18
2017	77,02	71,42	70,81
2018	77,92	71,95	71,37
2019	78,43	72,44	71,92
<b>2020</b>	<b>78,25</b>	<b>72,47</b>	<b>71,94</b>

Sumber : BPS (data diolah)

**Gambar 1**  
**Perkembangan IPM Kota Tangerang, Nasional dan Provinsi Banten**  
**Tahun 2016-2020**



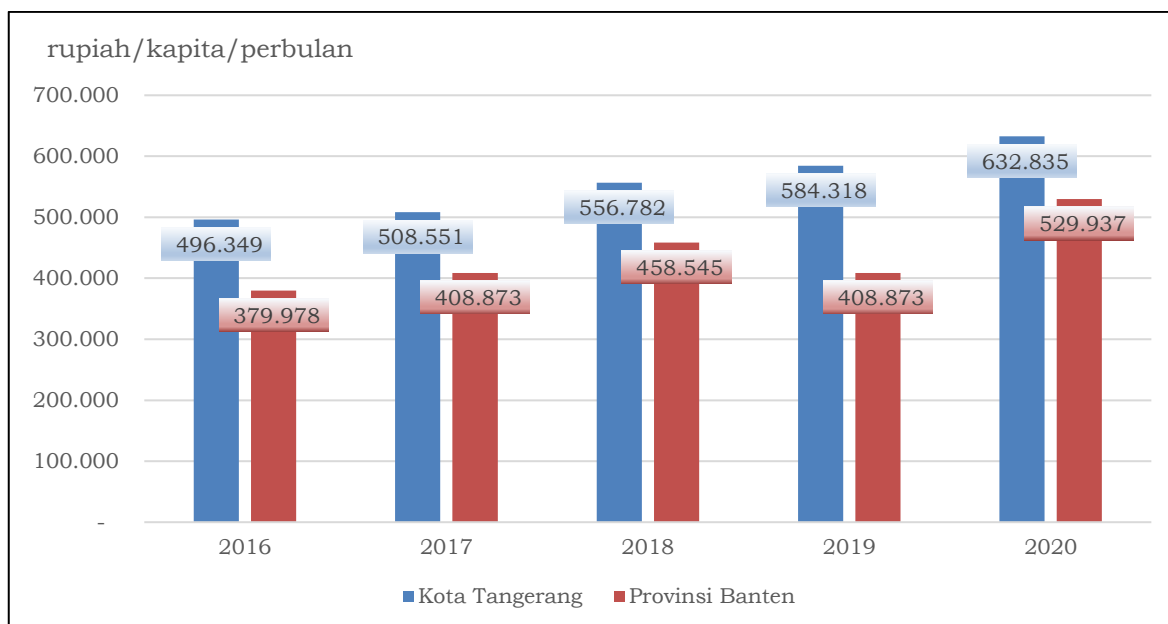
Sumber: BPS (data diolah)

Perkembangan IPM Kota Tangerang mengalami penurunan dengan Laju pertumbuhan negatif sebesar -0,23 poin. Meskipun mengalami penurunan tetapi nilai IPM masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional dan Provinsi Banten .

#### **b. Angka Kemiskinan**

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di manapun, termasuk Indonesia. Masalah mendasar (kemiskinan) tidak hanya menyangkut jumlah/persentase atau identifikasi penduduk miskin yang layak mendapat bantuan saja, juga menyangkut masalah definisi kemiskinan itu sendiri. Perbedaan definisi ini akan mengakibatkan perbedaan dalam mengukur tingkat kemiskinan dan perbedaan dalam persepsi atas hasil dan implementasinya.

**Gambar 2**  
**Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Tangerang dan Provinsi Banten**  
**Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS Kota Tangerang dan Provinsi Banten

Garis Kemiskinan Kota Tangerang diatas rata-rata garis kemiskinan di Provinsi Banten, bahkan yang tertinggi se Provinsi Banten. Tingginya Garis Kemiskinan Kota Tangerang dikarenakan tingginya harga komoditi makanan, bukan makanan dan tingkat kebutuhan seperti perumahan, listrik, bensin, pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya berimbas pada konsumsi masyarakat kelompok marginal di Kota Tangerang.

**Tabel 4**  
**Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**  
**Kota Tangerang Tahun 2016-2020**

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/ bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2016	496.349	102.880	4,94
2017	508.551	105.340	4,95
2018	556.782	103.490	4,76
2019	584.318	98.370	4,43
2020	632.835	118.220	5,22

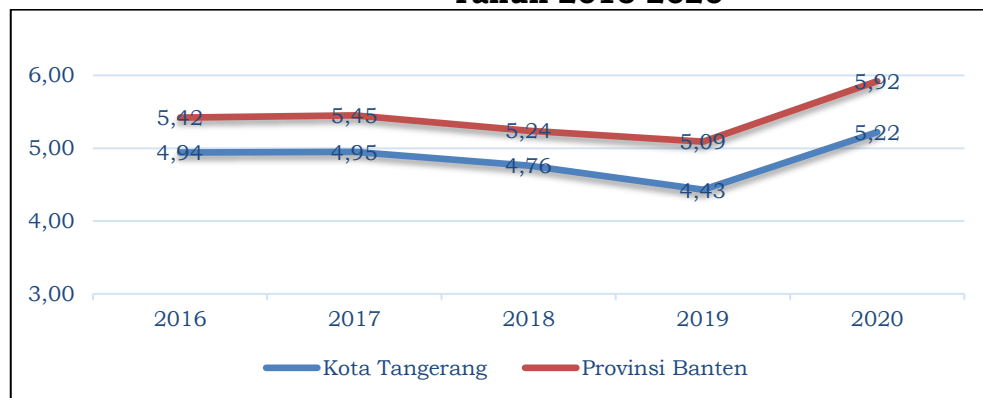
Sumber : BPS Kota Tangerang dan Provinsi Banten

Tabel diatas menunjukkan perkembangan jumlah dan persentase Penduduk miskin Kota Tangerang dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 berfluktuatif, dimana terjadi penurunan dan peningkatan jumlah dan persentase

penduduk miskin di Kota Tangerang dan persentase penduduk di Tahun 2020 terjadi peningkatan penduduk miskin dikarenakan kondisi pandemi Covid-19.

Meskipun pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin meningkat seiring dengan meningkatnya nilai garis kemiskinan di Kota Tangerang namun Pemerintah Kota Tangerang telah berhasil mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.

**Gambar 3**  
**Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Tangerang dan Provinsi Banten**  
**Tahun 2016-2020**



*Sumber : BPS Kota Tangerang dan Banten (diolah)*

Pemerintah Kota Tangerang melalui program kesehatan gratis, pendidikan, infrastruktur dan subsidi pangan tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan bagi warga Kota Tangerang. Masyarakat dengan pendapatan sedikit diatas garis kemiskinan tidak tergolong miskin, tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan biasanya hanya dengan sedikit guncangan masalah ekonomi mereka akan berubah menjadi miskin. Keadaan ini mengakibatkan banyak penduduk yang keluar masuk menjadi miskin.

Oleh karenanya program-program pro kemiskinan tidak hanya ditujukan untuk mereka yang berada dibawah garis kemiskinan tetapi juga masyarakat yang rentan miskin yaitu masyarakat yang dengan mudah jatuh ke bawah garis kemiskinan.

### **c. Angka Pengangguran**

Pada Tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tangerang sebesar 8,63%. Hal ini mengartikan bahwa diantara 100 orang yang termasuk

ke dalam angkatan kerja terdapat sekitar 8 hingga 9 orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jika dibandingkan dalam 5 tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tangerang cenderung stabil dikisaran 7 sampai dengan 8 %.

**Tabel 5**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tangerang dan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Banten Tahun 2018-2020**

Kab/Kota	Terbuka (TPT)		
	Agustus-2018	Agustus-2019	Agustus-2020
Kab. Pandeglang	8,33	8,71	9,15
Kab. Lebak	7,69	8,05	9,63
Kab. Tangerang	9,7	8,91	13,06
Kab. Serang	12,77	10,65	12,22
Kota Tangerang	7,4	7,13	8,63
Kota Cilegon	9,33	9,68	12,69
Kota Serang	8,16	8,08	9,26
Kota Tangsel	4,67	4,79	8,48
<b>Banten</b>	<b>8,52</b>	<b>8,11</b>	<b>10,64</b>

Sumber: BPS Provinsi Banten

Tingkat Pengangguran terbuka di Kota Tangerang Tahun 2020 terjadi peningkatan 1,5% sebagaimana Kota dan Kabupaten lain di Provinsi Banten juga meningkat, jika dibandingkan dengan daerah perkotaan di Provinsi Banten, Kota Tangerang menempati terendah kedua setelah Kota Tangerang Selatan.

Hal ini terjadi diakibatkan dampak Pandemic Covid-19 pada sektor ketenagakerjaan, seperti banyaknya perusahaan yang melakukan efisiensi dengan melakukan PHK dan merumahkan karyawan serta angkatan kerja mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1.108.057 orang pada Tahun 2019 menjadi sebanyak 1.127.599 orang pada Tahun 2020 (meningkat sebanyak 19.542 orang) dengan didominasi lulusan SMA sederajat.

#### **d. Pertumbuhan Ekonomi**

Pada Tahun 2020, Pandemi Covid-19 telah menyebabkan menurunnya perekonomian dan aktivitas di berbagai sektor dan wilayah Indonesia termasuk Kota Tangerang. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang pada tahun 2020 turun mencapai -6,92 persen. Pertumbuhan ekonomi ini mengalami nilai negatif cukup signifikan. Apabila dilihat dari laju

pertumbuhan menurut lapangan usahanya, lapangan usaha transportasi dan pergudangan menjadi indikasi penyebab terjadinya nilai pertumbuhan negatif. Dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial berskala Besar dalam menghadapi pandemi *Covid-19* terutama pembatasan terhadap penggunaan transportasi laju pertumbuhan di lapangan usaha tersebut mengalami penurunan hingga nilai negatif sebesar -45,72 persen.

Selama lima tahun terakhir lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 31,05 persen terhadap Total PDRB Kota Tangerang. Lapangan usaha Transpotasi dan Pergudangan mencakup Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkatan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Angkutan Udara, Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan kurir. Sub lapangan usaha Angkutan Udara dengan adanya Bandara Soeta memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB Kota Tangerang yaitu sebesar 26,79 persen. Dengan memiliki kontribusi yang besar ini maka berdampak sangat signifikan terhadap kontribusi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan serta pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang.

Penurunan dari laju pertumbuhan di sub lapangan usaha Angkutan Udara merupakan dampak dari naiknya harga tiket pesawat dan keputusan terkait bagasi berbayar dari maskapai penerbangan ditambah dengan pembatasan penumpang.

**Tabel 6**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2016-2020**

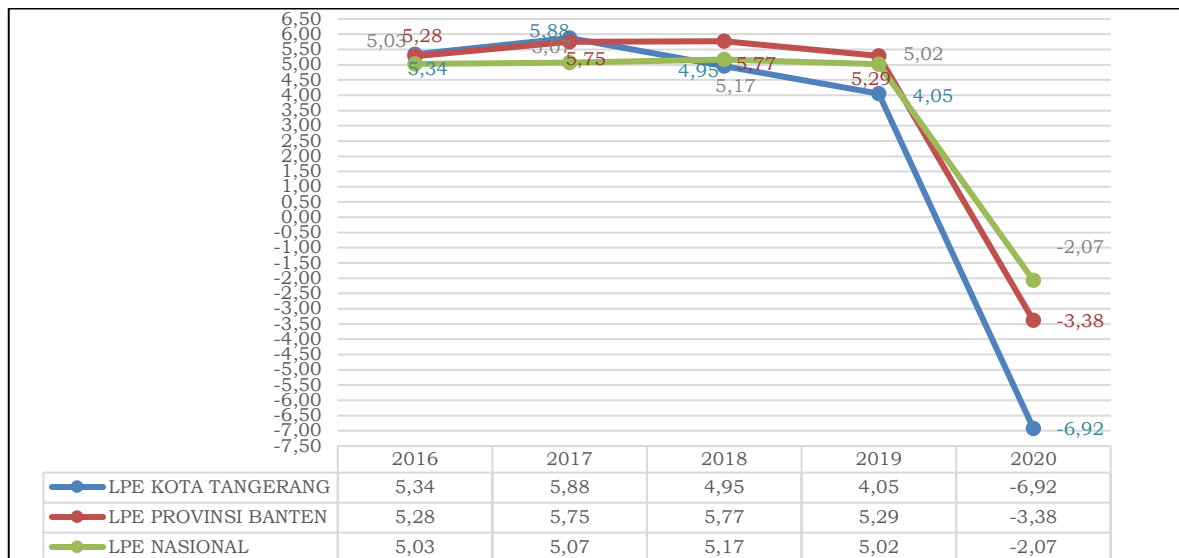
Tahun	LPE (%)		
	Kota Tangerang	Provinsi Banten	Nasional
2016	5,34	5,28	5,03
2017	5,88	5,75	5,07
2018	4,95	5,77	5,17
2019	4,05	5,29	5,02
2020	-6,92	-3,38	-2,07

Sumber: BPS Kota Tangerang, Banten dan Nasional

Keterangan: Tahun 2018 angka revisi, Tahun 2019 angka sementara, Tahun 2020 angka sangat sementara.



**Gambar 4**  
**Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2016-2020**



Sumber: BPS Kota Tangerang, Banten dan Nasional

Keterangan: Tahun 2018 angka revisi, Tahun 2019 angka sementara, Tahun 2020 angka sangat sementara

Selama periode 2016-2017, laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang meningkat terus. Namun pada Tahun 2018-2020 laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang mengalami penurunan yang sangat signifikan bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Nasional.

Secara umum, pada periode 2016-2017 pertumbuhan ekonominya cukup stabil terhadap gangguan/guncangan eksternal, baik dalam tataran global ataupun nasional. Pada Tahun 2018-2019, di tengah masih melemahnya perekonomian global dan nasional, Kota Tangerang tetap dapat mempertahankan LPE-nya di atas 4%. Akan tetapi pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang menurun hingga nilai negatif lebih rendah dibanding penurunan Provinsi Banten dan Nasional sejalan dengan menurunnya pertumbuhan sektor lapangan usaha transportasi dan perdagangan sebagai sektor yang memberikan distribusi PDRB terbesar ke Tiga di Kota Tangerang turun hingga nilai negatif sebesar -28,69. Lapangan Usaha transportasi merupakan sektor paling berdampak dengan adanya kebijakan pembatasan untuk menghadapi *Covid-19*.

#### e. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Pendapatan per kapita untuk Kota Tangerang dihitung dengan membagi pendapatan Kota Tangerang yang dicerminkan pada PDRB Kota Tangerang dengan jumlah penduduknya umum disebut PDRB Perkapita.

PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per-jiwa atau satu orang penduduk yang dihitung berdasarkan harga pada Tahun penghitungan dengan mengesampingkan laju inflasi.

Sedangkan PDRB per kapita yang dihitung berdasarkan harga konstan menunjukkan pertumbuhan nyata ekonomi per-kapita penduduk dengan memperhitungkan angka inflasi. Perkembangan PDRB per Kapita Kota Tangerang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7**  
**PDRB Perkapita Kota Tangerang Tahun 2016-2020**

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHB per Kapita per Tahun	Rp.Juta/ Jiwa/Tahun	65,04	69,63	73,84	77,16	63,26
PDRB ADHK per Kapita per Tahun	Rp.Juta/ Jiwa/Tahun	45,68	47,33	48,64	49,60	45,28
Laju Pertumbuhan PDRB ADHB per Kapita per Tahun	%	6,83	7,06	6,04	4,50	-18,01
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita per Tahun	%	3,00	3,60	2,77	1,97	-8,71
PDRB ADHB per Kapita per Bulan	Rp.Juta/ Jiwa/Bulan	5,42	5,80	6,15	6,41	5,25
PDRB ADHK per Kapita per Bulan	Rp.Juta/ Jiwa/Bulan	3,81	3,94	4,05	4,12	3,76

Sumber: BPS Kota Tangerang

Pendapatan perkapita Kota Tangerang mengalami penurunan seiring dengan Pembatasan kegiatan dalam upaya mengatasi pandemi *covid-19* terutama diakibatkan dampak menurunnya sektor transportasi di Kota Tangerang sebagai sektor yang berkontribusi cukup besar di Kota Tangerang. Di Tahun 2020 pendapatan penduduk Kota Tangerang dirata-ratakan sebesar 5,25 juta dalam sebulan berkurang sebesar 1,16 juta jika dibandingkan Tahun 2019.

#### **f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)**

Untuk mengukur tingkat ketimpangan dan pemerataan ekonomi digunakan Gini Ratio (GR) atau dikenal dengan istilah Indeks Gini. Indeks Gini merupakan sebagai salah satu parameter untuk menilai tingkat pemerataan hasil pembangunan melalui distribusi pendapatan. Nilai Indeks Gini terentang dari angka 0 (yang berarti merata sempurna) sampai dengan angka 1 (yang berarti tidak merata sempurna). Semakin mendekati angka 0 nilai Indeks Gini tersebut, maka semakin merata distribusi pendapatannya. Dalam periode Tahun 2016-2019 terjadi peningkatan angka Gini Ratio secara perlahan di Kota Tangerang. Perkembangan Gini Ratio Kota Tangerang Tahun 2016-2020 dapat diuraikan dalam tabel berikut ini.

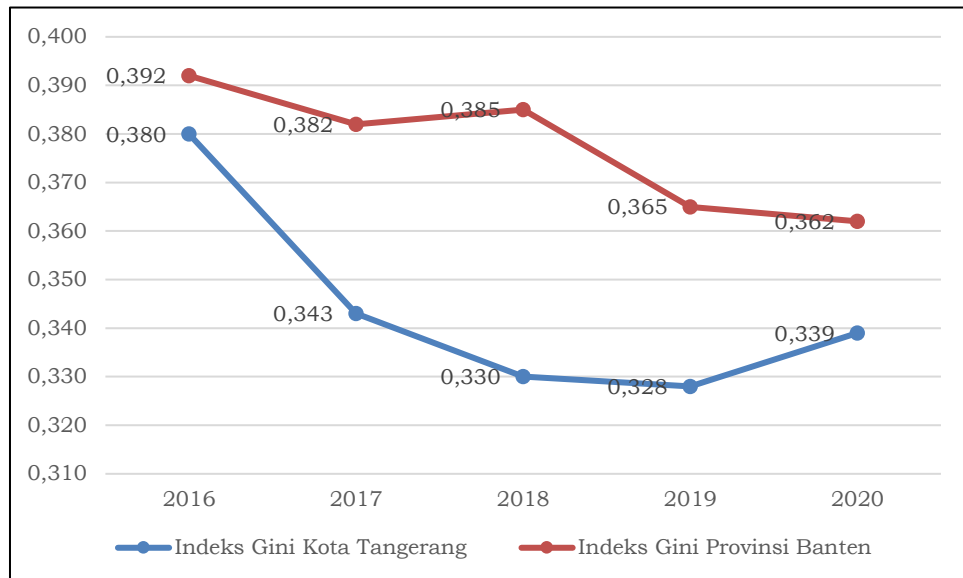
**Tabel 8**  
**Nilai Gini Rasio Kota Tangerang Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Gini Rasio</b>	<b>Keterangan</b>
2016	0,380	Ketimpangan sedang
2017	0,343	Ketimpangan sedang
2018	0,340	Ketimpangan sedang
2019	0,328	Ketimpangan sedang
2020	0,339	Ketimpangan sedang

Sumber: BPS Provinsi Banten

Indeks Gini signifikan menurun sebesar 0,052 poin selama periode 2016-2019, akan tetapi pada Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,011 dari Tahun 2019. Indeks Gini Kota Tangerang pada Tahun 2020 adalah 0,339 poin atau berada pada ketimpangan sedang. Capaian Indeks Gini Kota Tangerang Tahun 2020 tersebut juga mengandung arti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Tangerang pada Tahun 2020 dikategorikan sebagai tingkat “ketimpangan sedang”.

**Gambar 5**  
**Perkembangan Indeks Gini Kota Tangerang dan Provinsi Banten**  
**Tahun 2016-2020**



Sumber: BPS Provinsi Banten dan Tangerang

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang penting karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Tingginya ketimpangan pendapatan atau kemiskinan relatif, berarti kebijakan pembangunan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan capaian nilai Indeks Gini Kota Tangerang yang semakin membaik hingga Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan yang ditetapkan Pemda Kota Tangerang sejauh ini (khususnya kebijakan di bidang ekonomi) telah cukup efektif melayani seluruh lapisan masyarakat secara merata.

## **2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR**

Berikut dijelaskan capaian kinerja urusan pelayanan dasar dari 6 (enam) urusan yaitu Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan permukiman, Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Urusan Sosial.

**Tabel 9**  
**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**  
**Urusan Pelayanan Dasar Tahun 2020**

Urusan Pemerintahan	NO IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	%	38.986	58,97	Dinas Pendidikan	
			Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kota yang bersangkutan		66.108			
	2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	%	195.722	102,63	Dinas Pendidikan	
			Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kota yang bersangkutan		190.705			
	3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	%	83.044	94,06	Dinas Pendidikan	
			Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kota yang bersangkutan		88.291			
	4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	%	5.385	100,00	Dinas Pendidikan	
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kota yang bersangkutan		5.385			
Kesehatan	5	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kota		3.287	0,18	Dinas Kesehatan	
			Jumlah Penduduk kota		1.834.962			
	6	Persentase RS Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan kota yang terakreditasi minimal Tingkat Utama	%	15	83,33	Dinas Kesehatan	
			Jumlah RS kota		18			
	7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	40.533	100,00	Dinas Kesehatan	
			Jumlah ibu hamil di kota		40.533			

Urutan Pemerintah	NO IK K	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	%	38.691	100,00	Dinas Kesehatan	
			Jumlah ibu bersalin di kota		38.691			
	9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	38.691	100,00	Dinas Kesehatan	
			Jumlah bayi baru lahir di kota		38.691			
	10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	89.866	94,04	Dinas Kesehatan	
			Jumlah balita di kota		95.564			
	11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	238.826	100,00	Dinas Kesehatan	
			Jumlah anak usia pendidikan dasar di kota		238.826			
	12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	449.050	100,00	Dinas Kesehatan	
			Jumlah orang usia 15-59 tahun di kota		449.050			
	13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	43.334	100,00	Dinas Kesehatan	
			Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kota		43.334			
	14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	124.700	100,00	Dinas Kesehatan	
			Jumlah penderita hipertensi di kota		124.700			
	15	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	71.800	100,00	Dinas Kesehatan	
			Jumlah penderita DM di kota		71.800			
	16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	890	100,00	Dinas Kesehatan	
			Jumlah penderita ODGJ di kota		890			
	17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan	%	7.302	100,00	Dinas Kesehatan	

Urutan Pemerintah	NO IK K	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		pelayanan TBC sesuai standar	pelayanan kesehatan sesuai standar					
			Jumlah penderita TBC di kota		7.302			
	18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	31.417	100,00	Dinas Kesehatan	
			Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kota		31.417			
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kota (ha)	%	0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan kota (ha)		1			
	20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kota (ha)	%	0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kota (ha)		1			
	21	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) di tahun eksisting	%	0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Luas daerah irigasi kewenangan kota		1			
	22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	%	490.484	83,34	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	

Urutan Pemerintah	NO IK K	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			terlindungi di dalam sebuah kota.					
			Jumlah total rumah tangga di seluruh kota tersebut.		588.566			
	23	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	%	423.378	99,70	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
			Jumlah rumah di kota		424.633			
	24	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	%	43.338	100,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Jumlah IMB yang berlaku		43.338			
	25	Rasio kemandirian jalan	Panjang jalan kewenangan kota yang mantap	%	245.946	96,33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Panjang jalan keseluruhan di wilayah kota		255.318			
	26	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	149	93,71	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
			Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah kota		159			
	27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	605	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
			Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		605			
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2020	%	0	0,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
			Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2020		1			
	29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa	%	0	0,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	



Urutan Pemerintah	NO IK K	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			+ Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni					
			Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan		1			
	30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	311,37	91,61	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
			Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha		339,87			
	31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh/tidak layak huni	%	3.066	0,72	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
			Jumlah total unit rumah kota		424.633			
	32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	%	248.304	100,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
			Jumlah unit rumah kab/kota		248.304			
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	%	1.318	100,00	Satpol PP	
			Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk		1.318			
	34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	%	6	100,00	Satpol PP	
			Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi		6			
	35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		Orang	101.723	101.723	BPBD	
	36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Orang	101.723	101.723	BPBD	
	37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Orang	101.939	101.939	BPBD	
	38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh	%	175	100,00	BPBD	

Urutan Pemerintah	NO IK K	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah					
			Jumlah kejadian kebakaran di kota		175			
	39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		Menit	14,10	14,10	BPBD	
Sosial	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	13.100	100,00	Dinas Sosial	
			Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		13.100			
	41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	%	1.650	100,00	Dinas Sosial	
			Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota		1.650			

**Tabel 10**  
**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) Urusan**  
**Pelayanan Dasar Tahun 2020**

No	Urusan Pemerintahan	NO IK K	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pendidikan		<b>PENDIDIKAN PAUD</b>						
		1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)		Unit	256	256	Dinas Pendidikan	
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	0	0	Dinas Pendidikan	
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	0	0	Dinas Pendidikan	
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)		Orang	3.414	3.414	Dinas Pendidikan	
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)		Orang	3.414	3.414	Dinas Pendidikan	
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini		Orang	1.971	1.971	Dinas Pendidikan	
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah		Orang	538	538	Dinas Pendidikan	
			<b>PENDIDIKAN DASAR</b>						
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		Unit	667	667	Dinas Pendidikan	
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	6.073	6.073	Dinas Pendidikan	
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	3.050	3.050	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	NO IK K	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	154.056	154.056	Dinas Pendidikan	
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	54.558	54.558	Dinas Pendidikan	
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	8.430	8.430	Dinas Pendidikan	
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	4.062	4.062	Dinas Pendidikan	
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		Orang	8.430	8.430	Dinas Pendidikan	
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	4.062	4.062	Dinas Pendidikan	
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	671	671	Dinas Pendidikan	
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	598	598	Dinas Pendidikan	
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	671	671	Dinas Pendidikan	
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	598	598	Dinas Pendidikan	
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	7.557	7.557	Dinas Pendidikan	
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	3.809	3.809	Dinas Pendidikan	
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan		Orang	476	476	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	NO IK K	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			pelatihan calon kepala sekolah						
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	224	224	Dinas Pendidikan	
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	292	292	Dinas Pendidikan	
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	163	163	Dinas Pendidikan	
<b>PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA</b>									
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		Unit	667	667	Dinas Pendidikan	
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	6.073	6.073	Dinas Pendidikan	
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	3.050	3.050	Dinas Pendidikan	
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	154.056	154.056	Dinas Pendidikan	
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	54.558	54.558	Dinas Pendidikan	
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	8.430	8.430	Dinas Pendidikan	
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	4.062	4.062	Dinas Pendidikan	
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		Orang	8.430	8.430	Dinas Pendidikan	
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	4.062	4.062	Dinas Pendidikan	
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang		Orang	671	671	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintah	NO IK K	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			sekolah dasar (Negeri dan Swasta)						
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	598	598	Dinas Pendidikan	
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	671	671	Dinas Pendidikan	
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	598	598	Dinas Pendidikan	
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	7.557	7.557	Dinas Pendidikan	
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	3.809	3.809	Dinas Pendidikan	
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	476	476	Dinas Pendidikan	
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	224	224	Dinas Pendidikan	
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	292	292	Dinas Pendidikan	
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	163	163	Dinas Pendidikan	
<b>PENDIDIKAN KESETARAAN</b>									
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)		Orang	8	8	Dinas Pendidikan	
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan		Orang	0	0	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintah	NO IK K	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah						
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	0	0	Dinas Pendidikan	
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Orang	350	350	Dinas Pendidikan	
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Orang	350	350	Dinas Pendidikan	
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		Orang	202	202	Dinas Pendidikan	
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	476	476	Dinas Pendidikan	
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		Orang	19	19	Dinas Pendidikan	
2	Kesehatan	<b>Rasio daya tampung rumah sakit rujukan</b>							
		1	Jumlah RS Rujukan kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		Unit	19	19	Dinas Kesehatan	
		<b>Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi</b>							
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		Unit	31	31	Dinas Kesehatan	
		<b>Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil</b>							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			40.533	40.533	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		Orang	9.974	9.974	Dinas Kesehatan	
		<b>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</b>							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			38.691	38.691	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar		Orang	9.974	9.974	Dinas Kesehatan	
		<b>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</b>							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			38.691	38.691	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		Orang	9.974	9.974	Dinas Kesehatan	
		<b>Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar</b>							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			89.886	89.886	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar			3.481	3.481	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	NO IK K	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		<b>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</b>							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			238.826	238.826	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		Orang	17.181	17.181	Dinas Kesehatan	
		<b>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</b>							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			449.050	449.050	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	4.059	4.059	Dinas Kesehatan	
		<b>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</b>							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			43.334	43.334	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	5.094	5.094	Dinas Kesehatan	
		<b>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</b>							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			124.700	124.700	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	3.659	3.659	Dinas Kesehatan	
		<b>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</b>							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			71.800	71.800	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	3.659	3.659	Dinas Kesehatan	
		<b>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</b>							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			890	890	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	3.664	3.664	Dinas Kesehatan	
		<b>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</b>							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			7.302	7.302	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	3.659	3.659	Dinas Kesehatan	
		<b>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</b>							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			31.417	31.417	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	3.659	3.659	Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<b>Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir</b>							
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)		Ha	Tidak Dapat Diisi	Tidak Dapat Diisi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)		M	Tidak Dapat Diisi	Tidak Dapat Diisi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



No	Urusan Pemerintah	NO IK K	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kota (ha)		Ha	Tidak Dapat Diisi	Tidak Dapat Diisi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (m)		M	Tidak Dapat Diisi	Tidak Dapat Diisi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota		Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kota		Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota		Jumlah	Tidak Dapat Diisi	Tidak Dapat Diisi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		<b>Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kota/Kota</b>							
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)		Ha	Tidak Dapat Diisi	Tidak Dapat Diisi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)		M	Tidak Dapat Diisi	Tidak Dapat Diisi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kota (ha)		Ha	Tidak Dapat Diisi	Tidak Dapat Diisi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (m)		M	Tidak Dapat Diisi	Tidak Dapat Diisi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota		Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kota		Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota		Jumlah	Tidak Dapat Diisi	Tidak Dapat Diisi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		<b>Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi</b>							
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)	%	Tidak Dapat Diisi		Dinas Pekerjaan Umum dan	

No	Urusan Pemerintahan	NO IK K	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Panjang jaringan irigasi primer (m)		Tidak Dapat Diisi		Penataan Ruang		
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi Sekunder dalam kondisi baik (m)	%	Tidak Dapat Diisi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			Panjang jaringan irigasi Sekunder (m)	Tidak Dapat Diisi						
		3	Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik (m)	%	Tidak Dapat Diisi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			Panjang jaringan irigasi Tersier (m)	Tidak Dapat Diisi						
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota								
		1	Pemenuhan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kota	Dokumen RISPAM Kota Tangerang Tahun 2016 - 2030	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		
		2	Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kota	Dokumen Jakstrada SPAM Kota Tangerang Tahun 2016 - 2021	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD kota penyelenggaraan SPAM	PDAM Tirta Benteng	BUMD/UPTD	1	1	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	PT MAT, PT MOYA, PT BHJ, dan PT Cilamaya Subur	Izin	4	4	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.		Kerjasama	1	1	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik								
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		Rumah	411850	411.850	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		Rumah	11.528	11.528	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		Rumah	423.378	423.378	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		

No	Urusan Pemerintah an	NO IK K	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		Rumah	4.475	4.475	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		Rumah	4.475	4.475	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		Rumah	11.528	11.528	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik	%	411.850	96,98	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
				rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha		424.633			
		8	Kinerja penyediaan pelayanan IPLT akses aman	rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	%	4.475	100,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
				rumah di wilayah pengembangan IPLT		4.475			
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di SPALD T	%	11.528	100,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
				rumah di wilayah pengembangan SPALD T		11.528			
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat	%	382	100,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
				jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S		382			
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	jumlah sarana pengangkutan yang tersedia	%	13	100,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
				jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota		13			
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia	%	1	100,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
				jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota		1			
		13		jumlah rumah yang memiliki	%	11.528	100,00	Dinas Perumahan,	

No	Urusan Pemerintah an	NO IK K	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD		11.528		Permukiman dan Pertanahan	
				jumlah rumah yang dilayani @dengan SPALD-T pada kab/kota					
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot	%	16.385	100,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
				jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S		16.385			
<b>Rasio kepatuhan IMB kab/ kota</b>									
		1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana yang laik fungsi yang berlaku	%	12	34,29	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
				Jumlah bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana		35			
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting		Izin	43.338	43.338	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung		Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung		Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		Bangunan	16	16	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kota		Bangunan	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kota		Bangunan	3.180	3.180	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kota yang dipelihara/dirawat		Bangunan	3.180	3.180	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
<b>Rasio kemantapan jalan</b>									
		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kota		KM	255,318	255,318	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Urusan Pemerintah	NO IK K	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2	Panjang jalan yang dibangun		KM	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		3	Panjang jembatan yg dibangun		M	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan		KM	2,94	2,94	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		M	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		KM	2,49	2,49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi		M	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		8	Panjang jalan yang dipelihara		KM	6,86	6,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		9	Panjang jembatan yang dipelihara		M	990	990	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		<b>Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli</b>							
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kota	(Data Bimtek SMKK 2020)	Orang	159	159	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kota	(Data Bimtek SMKK 2020)	Orang	159	159	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kota	Data Bimtek SMKK 2020 (LULUS)	Orang	149	149	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada (Admin SIPJAKi)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari APBD kota	Ada (Data Penyedia RUP Paket Konstruksi)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	

No	Urusan Pemerintahan	NO IK K	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari APBN		Ada/Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari pendanaan lainnya		Ada/Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada (Data RUP Penyedia Paket Konstruksi)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kota	Ada (Perwal SOTK)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Ada (Data SKT+Data Bimtek)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada (Data SKT+Data Bimtek)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada (Data SKT+Data Bimtek)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kota	Ada (Data BUJK)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada (Data Rejap SIUJK)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan		Ada/Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	

No	Urusan Pemerintah	NO IK K	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya						
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	417 (Data BUJK)	Badan Usaha	417	417	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kota	250 (Data SIUJK)	Badan Usaha	250	250	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/kota	7269 (Data RUP)	Badan Usaha	7.269	7.269	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kota	417 (Data BUJK)	Badan Usaha	417	417	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	250 (Data SIUJK)	izin	250	250	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Pengawasan	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Kecelakaan Konstruksi	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Pengawasan	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	

No	Urusan Pemerintah	NO IK K	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		<b>Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota</b>						
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		Unit	35.326	35.326	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		Unit	35.326	35.326	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		Orang	101.723	101.723	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		Unit	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		Unit	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		Unit	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		Unit	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		Orang	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		Ha	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
			<b>Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota</b>						
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak		RT	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	



No	Urusan Pemerintahan	NO IK K	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM						
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		Ha	0,3452	0,3452	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
<b>Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani</b>									
		1	Jumlah luasan (ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		Ha	339,87	339,87	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		Unit	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		Ha	311,37	311,37	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
<b>Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)</b>									
		1	Jumlah rumah di kab/kota		Rumah	424.633	424.633	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		2	Jumlah unit PK RTLH		Rumah	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		3	Jumlah rumah tidak layak huni		Rumah	3.066	3.066	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni		Rumah	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		5	Rasio rumah dan KK	Jumlah KK Jumlah total unit rumah	%	588.566 424.633	138,61	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		6	Jumlah rumah pembangunan baru			0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
<b>Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)</b>									
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		Perumahan	70	70	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	

No	Urusan Pemerintahan	NO IK K	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		Rumah	424.633	424.633	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		Rumah	424.633	424.633	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)		Rumah	423.378	423.378	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		Perumahan	70	70	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		Rumah	424.633	424.633	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		Pengembang	75	75	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		8	Jumlah pengembang yang terregistrasi		Pengembang	75	75	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		Pengembang	172	172	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<b>Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</b>							
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota yang ditangani		Jumlah	1.318	1.318	Satpol PP	
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		Orang	174	174	Satpol PP	
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		Perda & Perkada	6	6	Satpol PP	
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		Orang	19	19	Satpol PP	
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		SOP	15	15	Satpol PP	
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal		Jumlah	166	166	Satpol PP	
		<b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>							
		1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	0	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan			1			
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan	Jumlah penduduk di kawasan rawan	%	101.723	100,00	Badan Penanggulangan	

No	Urusan Pemerintah	NO IK K	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana				an Bencana Daerah	
				Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		101.723			
			<b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>						
		1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	0	0,00	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah	
				Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan		1			
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	0	0,00	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah	
				Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan		1			
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	%	3.120	3,07	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah	
				Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana		101.723			
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	%	3.120	3,07	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah	
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		101.723			
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops	%	101.723	100,00	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah	
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		101.723			
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan	%	101.723	100,00	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah	
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		101.723			
			<b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>						
		1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	%	1	100,00	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah	
				Jumlah seluruh penetapan status KLB		1			

No	Urusan Pemerintahan	NO IK K	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	%	1.326	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana		1.326			
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	300	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana		300			
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	%	101.939	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana		101.939			
		<b>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>							
		1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kota		Layanan	13	13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		Pos	7	7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Untuk di kantor kecamatan tidak ada. Tetapi terdapat pada 2 pos, 4 UPT, dan 1 markas	Orang	85	85	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		Pos	7	7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		Sarpras	186	186	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		Orang	300	300	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan		Orang	280	280	Badan Penanggulangan	

No	Urusan Pemerintahan	NO IK K	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran					an Bencana Daerah	
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran		Kegiatan	2	2	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah	
6	Sosial	<b>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>							
		1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		Layanan	2	2	Dinas Sosial	
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM		Data	13.100	13.100	Dinas Sosial	
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		Tim	1	1	Dinas Sosial	
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau		Orang	13.100	13.100	Dinas Sosial	
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		Unit	3	3	Dinas Sosial	
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		Orang	9.374	9.374	Dinas Sosial	
		7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		Unit	142	142	Dinas Sosial	
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		Orang	36	36	Dinas Sosial	
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu		Orang	68	68	Dinas Sosial	
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter		Alat	3	3	Dinas Sosial	
		11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia		Paket	16	16	Dinas Sosial	
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		Orang	30	30	Dinas Sosial	
		13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah		Orang	4	4	Dinas Sosial	
		14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		Orang	1.709	1.709	Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintah	NO IK K	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		Orang	153	153	Dinas Sosial	
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		Kegiatan	4	4	Dinas Sosial	
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		Orang	0	0	Dinas Sosial	
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar		Orang	0	0	Dinas Sosial	
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		Orang	234	234	Dinas Sosial	
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		Orang	234	234	Dinas Sosial	
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		Orang	16	16	Dinas Sosial	
		<b>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota</b>							
		1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		Orang	1.650	1.650	Dinas Sosial	
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		Orang	1.650	1.650	Dinas Sosial	
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		Penampungan	4	4	Dinas Sosial	
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		Paket	9.374	9.374	Dinas Sosial	
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		Orang	0	0	Dinas Sosial	
		6	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		Orang	1.709	1.709	Dinas Sosial	

### **3. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019**

#### **a. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2019**

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Tahun 2019, bahwa kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota Tangerang mendapatkan nilai tertinggi untuk tingkat Provinsi Banten dengan skor 4,0244 (Sangat Tinggi). Adapun untuk hasil EPPD Tingkat Nasional sampai dengan saat ini belum ditetapkan dan diumumkan secara resmi oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### **b. Opini Atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2019**

Pemerintah Kota Tangerang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut yang ke-tiga belas kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pemerintah Kota Tangerang terus membangun akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tata kelola keuangan daerah. Penghargaan Opini WTP juga merupakan hasil kinerja aparatur Pemerintah Kota Tangerang yang mampu menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **4. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH**

Realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluaran, dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan dapat dijelaskan secara rinci dalam tabel berikut :

**Tabel 11**  
**Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja**  
**Daerah Tahun Anggaran 2020**

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020 (Unaudited)
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.609.275.478.525,00</b>	<b>3.648.663.446.803,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan asli daerah</b>	<b>1.464.562.583.407,00</b>	<b>1.649.002.723.454,00</b>
1.1.1	Pajak daerah	1.247.328.691.569,00	1.364.323.174.430,00
1.1.2	Retribusi daerah	52.398.045.250,00	62.933.916.205,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	14.064.131.363,00	14.064.131.359,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	150.771.715.225,00	207.681.501.460,00
<b>1.2</b>	<b>Dana perimbangan</b>	<b>1.400.135.373.059,00</b>	<b>1.355.486.855.234,00</b>
1.2.1	Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	319.750.909.711,00	284.936.311.782,00
1.2.2	Dana alokasi umum	846.130.955.000,00	843.004.535.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	234.253.508.348,00	227.546.008.452,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>744.577.522.059,00</b>	<b>644.173.868.115,00</b>
1.3.1	Hibah	261.015.599.936,00	208.141.340.000,00
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	360.365.426.123,00	312.836.032.115,00
1.3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus	78.196.496.000,00	78.196.496.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah lainnya	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.609.275.478.525,00</b>	<b>3.648.663.446.803,00</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4.061.484.660.063,09</b>	<b>3.512.296.516.215,88</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.714.061.371.221,05</b>	<b>1.494.701.562.532,00</b>
2.1.1	Belanja pegawai	1.381.216.641.356,05	1.320.382.814.736,00
2.1.2	Belanja bunga	0,00	0,00
2.1.3	Belanja subsidi	4.537.934.000	0,00
2.1.4	Belanja hibah	151.211.680.479,00	88.387.390.475,00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.738.243.000,00	2.738.243.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	174.356.872.386,00	83.193.114.321,00



NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020 (Unaudited)
1	2	3	4
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2.347.423.288.842,04</b>	<b>2.017.594.953.683,88</b>
2.2.1	Belanja pegawai	59.428.907.770,00	55.523.599.277,00
2.2.2	belanja barang dan jasa	1.796.456.332.725,31	1.683.063.937.951,88
2.2.3	belanja modal	491.538.048.346,73	279.007.416.455,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.061.484.660.063,09</b>	<b>3.512.296.516.215,88</b>
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>-452.209.181.538,09</b>	<b>136.366.930.587,12</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>452.209.181.538,09</b>	<b>452.206.611.820,00</b>
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan pembiayaan</b>	<b>452.209.181.538,09</b>	<b>452.206.611.820,00</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	452.209.181.538,09	452.206.611.820,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
6.2.3	pembayaran pokok utang	0,00	0,00
6.2.7	Pelunasan Biaya Produksi	0,00	0,00
	<b>Pembiayaan netto</b>	<b>452.209.181.538,09</b>	<b>452.206.611.820,00</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>588.573.542.407,12</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2021

\*Data Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang TA. 2020 Unaudited

## 5. INOVASI DAERAH

Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Beberapa inovasi daerah yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2020 dan juga diikutsertakan dalam penilaian Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

**a. CAGEUR JASA (Colaborasi Kunjungan Rumah Integrasi Keluarga Sehat)**

Program Cageur Jasa merupakan upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mendatangi rumah warga secara langsung. Cageur Jasa selaras dengan program Kementerian Kesehatan yang berusaha untuk membuat pendekatan atau sosialisasi kesehatan kepada masyarakat.



**b. APLIKASI TANGERANG LIVE**

Tangerang LIVE merupakan inovasi pelayanan publik melalui aplikasi untuk mengakses seluruh pelayanan OPD dalam satu genggaman. Inovasi berbasis mobile terintegrasi dengan NIK sebagai single sign on ke seluruh pelayanan publik, saat ini telah tersedia 13 kategori pelayanan yang didukung oleh 49 aplikasi berbasis android.



### c. **APLIKASI PERIZINAN ONLINE TERINTEGRASI 123**

Aplikasi Perizinan Online Terintegrasi 123 merupakan inovasi yang dilatarbelakangi oleh tuntutan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik. Didalam aplikasi Perizinan Online terintegrasi 123, tidak hanya terintegrasi sebanyak 123 pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik, tetapi juga meliputi berbagai inovasi lainnya, yaitu terintegrasi SIAK (NIK Pemohon), SIKDA (Login Admin OPD), SISMIOP (NOP), (Keterangan Status Pajak), SIMPAD (Izin Reklame), dan BJB (Pembayaran ATM, Alfamart, Tokopedia).



## **6. PENUTUP**

Demikianlah Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Tahun 2020, Pemerintah Kota Tangerang ditahun-tahun mendatang akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penerapan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Tangerang, yaitu Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera, Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kota Tangerang.